



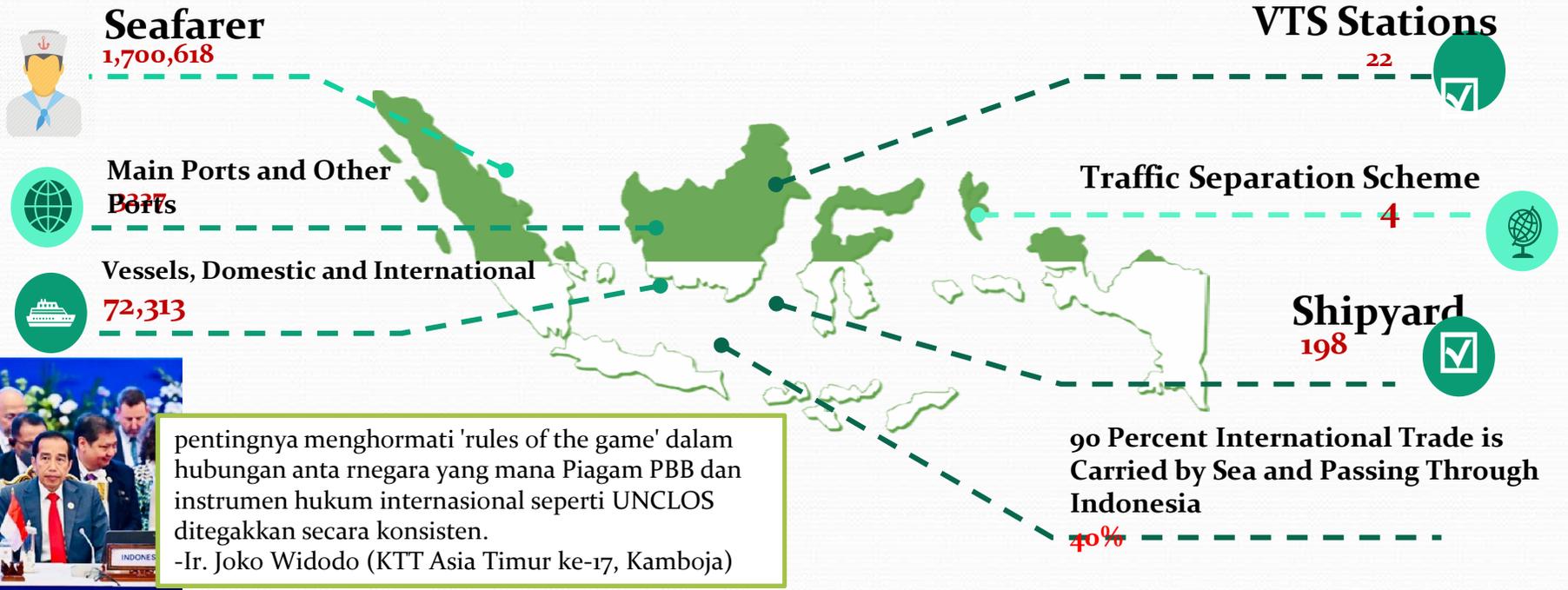
# **Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju**

**Capt. Dr. H. Datep P Saputra S.Sos., M.M., MBA  
(Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia)**

**Selasa, 15 November 2022**

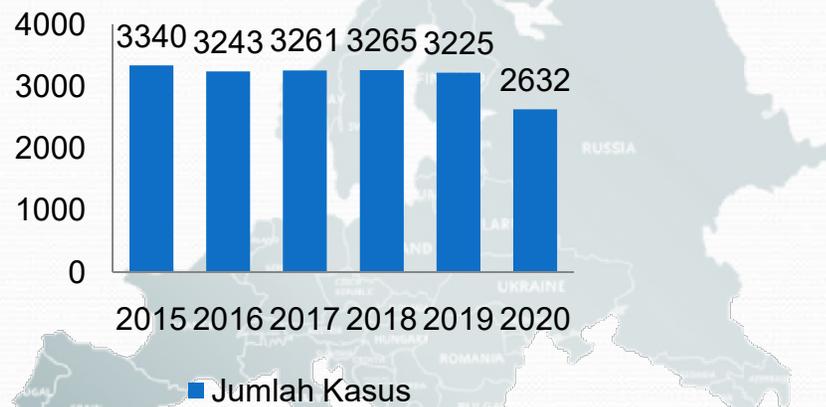
# INDONESIA MARITIME PROFILE 2021

One of the archipelagic country in the middle of largest ocean of the world, Sea transportation is **playing a significant** role for Indonesia. As the world's largest archipelagic state at **1,904,569** square kilometers with **17,504** islands and **62.89%** of Indonesia is a sea area, the coastline length about **108 thousands kilometers**.



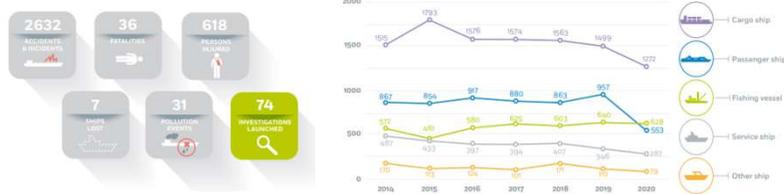
# DATA KECELAKAAN KAPAL

## PERAIRAN EROPA



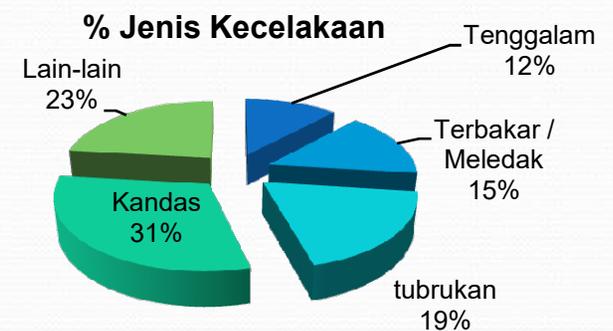
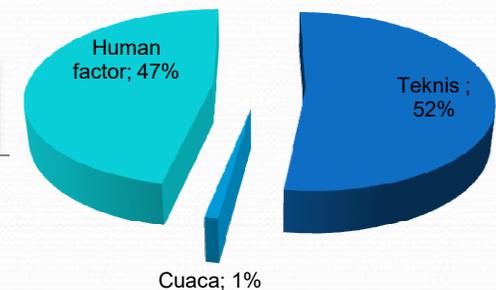
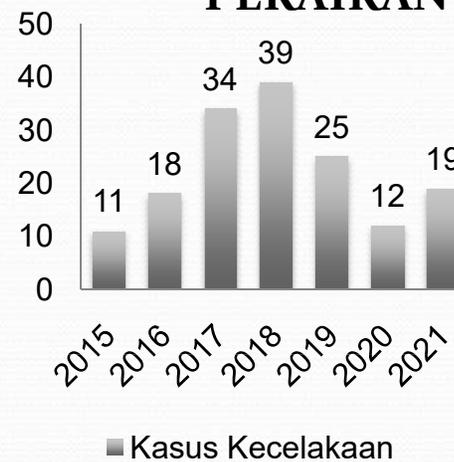
Overview of key figures for 2020

Ship types involved



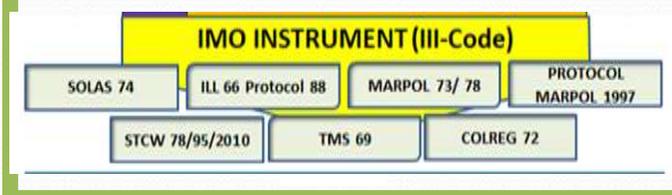
Sumber : European Maritime Safety Agency

## PERAIRAN INDONESIA



Sumber : Komite Nasional Keselamatan Transportasi

# GAMBARAN UMUM Kondisi Saat Ini



## SISTEM MANAJEMEN



**SASARAN**  
MENINGKATKAN KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PENCEGAHAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN (Zero Accident)

**JUDUL:**  
"PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN, KEAMANAN  
DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN"

RANCANGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN Transportasi Maritim ( SMTM)

No	Instrumen SMTM
1	Manual Sea Transportation Management System (STMS)
2	Policy of implementation
3	Supporting Procedures implementation
4	Work instructions to stakeholders
5	Records of implementation, enforcement, review and evaluation



**INOVASI**

**LEVEL STRATEGIS**

Scope	Page	Contents
1.1 General	3	Objective
1.2 Application	3-6	Definition of Terms
1.3 Normative references	7	Coverage
1.4 Terms and definitions	7-9	Setting the Security Level
1.5 Quality management system	9-14	Ship Security Assessment
1.5.1 General requirements	14-27	Ship Security Plan
1.5.2 Documentation requirements	28-32	Verification & Certification of Ships
1.5.3 Management responsibility	33-40	Port Facility Security Assessment
1.5.4 Planning	40-57	Port Facility Security Plan
1.5.5 Responsibility, authority and communication	57-59	Declaration of Security
1.5.6 Management review	59-60	Statement of Compliance of a Port Facility
1.5.7 Resource management		
1.5.8 Provision of resources		
1.5.9 Work environment		
1.5.10 Product realization		
1.5.11 Planning of product realization		
1.5.12 Customer-related processes		
1.5.13 Design and development		
1.5.14 Purchasing		
1.5.15 Production and service provision		
1.5.16 Control of monitoring and measuring equipment		
1.5.17 Measurement, analysis and improvement		
1.5.18 General		
1.5.19 Monitoring and measurement		
1.5.20 Control of non-conforming product		
1.5.21 Analysis of data		
1.5.22 Improvement		
Annex A (Informative)		
Annex B (Informative)		
Bibliography		

**DAFTAR ISI  
SISTEM MANAJEMEN**

# RANCANGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN Transportasi Laut ( SMTL)

No	Instrumen SMTM
1	Manual Sea Transportation Management System (STMS)
2	Policy of implementation
3	Supporting Procedures implementation
4	Work instructions to stakeholders
5	Records of implementation, enforcement, review and evaluation

## IMO INSTRUMENT (III-Code)



## REQUIREMENTS OF IMO CONVENTION

### FLAG STATE

- IMPLEMENTATION
- DELEGATION OF AUTHORITY
- ENFORCEMENT
- FLAG STATE SURVEYORS
- FLAG STATE INVESTIGATIONS
- EVALUATION AND REVIEW

### PORT STATE AND COASTAL STATE

- IMPLEMENTATION
- ENFORCEMENT
- EVALUATION AND REVIEW

## SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT (SMTL) BASED ON III-CODE

## SURVEY RESULTS OF IMO MEMBER IN LONDON, 02 s.d. 08 Juli 2019 PERSIAPAN PEMBERLAKUAN IMSAS

### ***Developing an efficient strategy***

1. Menyusun Model Quality Management System Transportasi Maritim
2. Wakil Sekjen IMO menyarankan kepada Indonesia untuk menyusun *developing an efficient strategy*, Indonesia disarankan menunjuk orang/pihak yang *credential expert being supported* by IMO. Bila Indonesia akan diaudit tahun 2024 (*Responsible of schedule of audit*) maka Indonesia diharapkan fokus pada *kind corrective action of VIMSAS Finding*.
3. Tiga kunci sukses Indonesia adalah:  
Strategy utama (primary) Indonesia sebagai *large archipelago country*, tidak hanya focus pada pelayaran internasional (*event small part*), tetapi juga pada pelayaran domestic sebagai bagian terbesar Indonesia, *domestic ferry, casualty not only limited for ship < 500 GT*, standard implementasi yang digunakan di Indonesia.

### **FGD OF IMO MEMBER IN LONDON, 30 Oktober s.d. 02 November 2019**



## HASIL WAWANCARA ANGGOTA IMO DI LONDON

NO	ITEM	UEA	PANAMA	SINGAPORE	FRANCE	AUSTRALIA	SOUTH KOREA	BRAZIL	THAILAND	JAPAN	MALAYSIA	PHILIPPINES
1	Manual	X	√	√	√	√	√	X	X	√	X	X
2	Policy Of Implementation	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	X
3	Procedures Supporting The Implementation	X	X	X	X	√	√	X	X	√	X	X

No	Item	Belum memiliki	Sedang menyusun	Sudah memiliki	Nama Negara Belum Memiliki	Nama Negara Sedang menyusun	Nama Negara Sudah memiliki
1	Manual	5 negara	0 negara	6 negara	UEA, Brazil, Thailand, Malaysia, Philippines	-	Panama, Singapore, France, Australia, South Korea, Japan
2	Policy of implementation	3 negara	0 negara	8 negara	Thailand, Malaysia, Philippines	-	UEA, Panama, Singapore, France, Australia, South Korea,
3	Procedures supporting the implementation	8 negara	0 negara	3 negara	UEA, Panama, Singapore, France, Brazil, Thailand, Malaysia, Philippines	-	Australia, South Korea, Japan
4	Work instruction to all stakeholders	8 negara	3 negara	0 negara	UEA, Panama, Singapore, France, Brazil, Thailand,	Australia, South	-

# KETENTUAN NCVS



Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia atau NCVS wajib dilakukan bagi kapal berbendera Indonesia < GT 500



Hasil investigasi KNKT menunjukkan Kecelakaan kapal di perairan Indonesia banyak terjadi pada kapal-kapal non-konvensi sehingga ketentuan NCVS perlu dilaksanakan secara konsisten, hal ini bisa sebagai langkah untuk mewujudkan zero accident.



Dengan kondisi cuaca perairan Indonesia yang dewasa ini sering ekstrim kapal non konvensi sebaiknya di lengkapi peralatan penolong perorangan life jacket, life bouy yang memadai sesuai solas 74 chapter III.



Pemberlakuan NCVS Fase II dan Fase III agar disesuaikan dengan kemampuan penyiapan standar marine product, dengan produksi lokal yang sudah mendapat approval dari isntitusi yang berwenang.

# MANFAAT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

1

- Terciptanya tata kelola sesuai sistem manajemen mutu berbasis IMO Convensi (Ill-Code) dalam rangka persiapan pemberlakuan IMSAS 2024

2

- Memudahkan pemeriksaan, pengujian dan pendokumentasian pada regulator dan operator dalam rangka menegakan ketentuan dan peraturan secara konsisten.

3

- Meningkatkan Keselamatan, Keamanan dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Zero Accident)

# REKOMENDASI

- Upaya pembangunan Infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah seperti pelabuhan, galangan (Dock), penyediaan VTS, ketersediaan sumber daya manusia (pelaut), dan alur pelayaran (TSS) agar diberdayakan secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi pada APBN dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045
- Dalam rangka persiapan IMSAS 2024 Perlu dibangun sistem manajemen transportasi laut (SMTL) yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perhubungan, sehingga dapat meningkatkan Keselamatan, Keamanan dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Zero Accident)
- Ketentuan NCVS agar dilaksanakan secara konsisten pada seluruh kapal dibawah ukuran GT 500,
- Perlu adanya produk hukum yang berkesinambungan, apabila produk baru tidak menghilangkan aturan yang masih relevan.
- Banyaknya peraturan dan perundangan yang mengatur hukum di laut perlu adanya kebijakan omnibus law dalam mengatur penegakan hukum di laut yang selama ini membingungkan dan dapat menimbulkan biaya tinggi bagi operator.



**SEKIAN & TERIMA KASIH**